



Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Rendahnya Wakaf Produktif

Ngazizatul Maisaroh^{1*}, Muhammad Saleh Mire², Sri Wahyuni³

^{1,2,3} Universitas Mulawarman, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 02, 2025

Revised August 13, 2025

Accepted August 14, 2025

Available online August 14, 2025

Kata Kunci:

wakaf produktif; Analytic Network Process; nazir

Keywords:

productive waqf; Analytic Network Process; nazir



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Ngazizatul Maisaroh, Muhammad Saleh Mire, Sri Wahyuni. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis permasalahan dan solusi pengembangan wakaf produktif di Kalimantan Timur menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kuesioner dengan 10 responden ahli yang terdiri dari nazir wakaf, wakif, perwakilan BWI Kaltim, Kemenag Kaltim, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan masalah utama adalah rendahnya kompetensi nazir (GMk 0.49), minimnya peran BWI Kaltim (0.54), kurangnya dukungan pemerintah (0.67), dan pemahaman wakif yang masih tradisional (0.63). Solusi prioritas yang direkomendasikan meliputi pembinaan dan pendampingan nazir (GMk 0.50), optimalisasi peran BWI (0.39), peningkatan dukungan pemerintah melalui APBD (0.50), serta edukasi dan sosialisasi wakaf produktif (0.67). Implementasi solusi membutuhkan sinergi antara nazir, BWI, pemerintah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif di Kalimantan Timur.

ABSTRACT

This study analyzes the problems and solutions for productive waqf development in East Kalimantan using the Analytic Network Process (ANP) method. Data was collected through in-depth interviews and questionnaires with 10 expert respondents consisting of waqf nazir, waqif, BWI East Kalimantan representatives, Ministry of Religious Affairs East Kalimantan, and academics. The results show the main problems are low nazir competency (GMk 0.49), minimal role of BWI East Kalimantan (0.54), lack of government support (0.67), and traditional waqif understanding (0.63). Priority solutions recommended include nazir training and mentoring (GMk 0.50), optimization of BWI's role (0.39), increased government support through regional budgets (0.50), and productive waqf education and socialization (0.67). Solution implementation requires synergy between nazir, BWI, government, and society to optimize productive waqf management in East Kalimantan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam hal wakaf. Data World Population Review 2023 mencatat 230 juta penduduk atau sekitar 87% dari populasi Indonesia memeluk Islam. Selain itu, Indonesia memiliki tanah wakaf seluas 57.000 hektar berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag (SIWAK). Dengan aset sebesar ini, wakaf idealnya dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui pengurangan pengeluaran pemerintah, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi besar ini belum dikelola secara optimal. Pemanfaatan wakaf di Indonesia sebagian besar masih terbatas pada pembangunan tempat ibadah tanpa pengembangan ekonomi umat secara signifikan.

Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang strategis dalam pengembangan wakaf produktif, dengan jumlah tanah wakaf yang tersebar di 3.755 lokasi seluas 944,59 hektar (SIWAK, 2024). Sayangnya, 75% tanah wakaf di provinsi ini digunakan untuk pembangunan masjid dan mushala, 7% untuk madrasah, 3% untuk pesantren, 10% untuk

*Corresponding Author

E-mail addresses: maisarahaziza@gmail.com (Ngazizatul Maisaroh)

kuburan, dan 5% untuk keperluan sosial lainnya. Kondisi ini mencerminkan pola pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia yang masih terfokus pada kebutuhan ibadah, meskipun pemanfaatan seperti ini kurang memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Pemanfaatan wakaf dalam konteks ekonomi seharusnya mengikuti contoh yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, yang menekankan pentingnya memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf untuk kepentingan umum. Wakaf dinilai sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir selama aset wakaf memberikan manfaat kepada orang banyak (Anohib, 2017). Wakaf produktif, yang mengacu pada pengelolaan aset wakaf untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan, dapat menjadi solusi. Hasil dari pengelolaan wakaf ini kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai tujuan wakaf.

Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf memiliki nilai sosial sekaligus ekonomis. Contohnya, tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas seperti gedung perkantoran, swalayan, klinik, atau bahkan ruang serbaguna di bawah masjid untuk kegiatan komersial seperti seminar atau resepsi. Hal ini tidak hanya mendukung operasional masjid tetapi juga membantu pembangunan ekonomi Masyarakat (Fauzia et al., 2016). Dengan regulasi seperti Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006, pengelolaan wakaf diharapkan menjadi lebih profesional, termasuk pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, motivator, dan fasilitator dalam pemberdayaan wakaf nasional.

Namun, tantangan tetap ada. Belum optimalnya pemanfaatan wakaf di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu pengelola wakaf (nazir), pewakaf (wakif), dan regulasi pemerintah. Dukungan pemerintah dalam hal fasilitas, regulasi, investasi, dan bantuan dana masih belum maksimal (Ali et al., 2018; Huda et al., 2016). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai prioritas masalah dan solusi untuk pengembangan wakaf produktif, khususnya di Kalimantan Timur. Hal ini penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi prioritas yang dapat diterapkan dalam jangka waktu tertentu.

Berbagai penelitian menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia adalah rendahnya kompetensi nazir, kurangnya peran regulator seperti BWI, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif. (Putra & Sikki, 2025) menyoroti perlunya edukasi bagi nazir dan kebijakan pendukung dari BWI, sementara (Fitri & Wilantoro, 2018) merekomendasikan pembinaan dan pendampingan nazir. (Ali et al., 2018) menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi nazir dan sosialisasi wakaf kepada masyarakat. (Huda et al., 2017) menyarankan transformasi nazir individu menjadi organisasi dan inovasi pengelolaan wakaf. (Meliza & Saputra, 2022) mengusulkan pelatihan nazir dan optimalisasi peran BWI, sedangkan (Safitri, 2021) merekomendasikan sinergi antara regulator, nazir, dan pengusaha. Secara keseluruhan, solusi utama melibatkan pelatihan, edukasi, dan kolaborasi antar pihak untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya pengelolaan wakaf produktif di Kalimantan Timur sekaligus merumuskan solusi yang dapat diterapkan. Dengan pendekatan yang berbasis analisis kondisi riil, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah dan pengelola wakaf untuk mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf sehingga memberikan dampak positif bagi ekonomi umat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analytic Network Process (ANP) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah serta solusi pengelolaan wakaf di Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah

Kalimantan Timur dengan responden yang terdiri dari 10 ahli, meliputi nazir wakaf, wakif, Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kalimantan Timur, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, serta akademisi. Pemilihan responden dilakukan menggunakan metode purposive sampling, dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman, jabatan, dan rekam jejak profesional yang relevan.

Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur, wawancara mendalam (in-depth interview), dan survei menggunakan kuesioner perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Teknik dekomposisi diterapkan untuk mengurai dan menganalisis kompleksitas masalah ke dalam jaringan ANP yang terdiri dari dua cluster utama, yakni masalah dan solusi. Setiap cluster memiliki sub-cluster yang mencakup aspek nazir, wakif, kelembagaan, dan pemerintah.

Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Super Decision dan Microsoft Excel. Kuesioner pairwise comparison dirancang berdasarkan skala numerik 1-9 untuk menilai bobot pengaruh antar elemen di dalam cluster. Data responden kemudian dianalisis menggunakan rumus Kendall's Coefficient of Concordance (W) untuk mengukur tingkat kesesuaian antar responden dan Geometric Mean untuk merata-ratakan pendapat individu. Hasil pengolahan data menghasilkan skala prioritas yang digunakan untuk menentukan solusi optimal dalam pengelolaan wakaf produktif.

Penelitian ini juga melibatkan validasi dari pakar dan praktisi untuk memastikan keakuratan model ANP yang dikembangkan. Data yang diperlukan meliputi gambaran umum Kalimantan Timur, data wakaf, nazir, serta data pendukung lainnya. Sebagai instrumen utama, peneliti bertanggung jawab dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, dan melakukan analisis hingga menghasilkan kesimpulan. Teknik analisis meliputi dekomposisi, pembuatan jaringan kerangka model ANP, analisis kuesioner, hingga sintesis data untuk menentukan prioritas solusi berdasarkan tingkat pengaruhnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang telah diolah menghasilkan tabel ANP sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil ANP prioritas W Rate Agreement seluruh Cluster

CLUSTER	KENDALL'S COEFFICIENT of CONCORDANCE (W)					
	PAKAR	P-VALUE	PRAKTISI	P-VALUE	GAB	P-VALUE
MASALAH	0.4730	0.0640*	0.8920	0.0038***	0.4730	0.0026***
SOLUSI	0.1520	0.5163	0.9040	0.0035***	0.3800	0.0097***
MASALAH NAZIR	0.5660	0.0231**	0.5320	0.0309**	0.4975	0.0005***
MASALAH WAKIF	0.4900	0.0862*	0.0100	0.9512	0.1075	0.3412
MASALAH REGULATOR	0.1300	0.5220	0.3100	0.2122	0.1225	0.2937
MASALAH PEMERINTAH	0.0400	0.6547	0.3600	0.1797	0.0400	0.5270
SOLUSI NAZIR	0.6780	0.0088***	0.4770	0.0489**	0.5387	0.0002***
SOLUSI WAKIF	1.0000	0.0253**	0.3600	0.1797	0.6400	0.0114**
SOLUSI REGULATOR	0.5028	0.0394**	0.4212	0.0772	0.4268	0.0018***
SOLUSI PEMERINTAH	0.0400	0.6547	0.0400	0.6547	0.0400	0.5270

***signifikan pada 1%; **signifikan pada 5%; *signifikan pada 10%

Sumber: penulis (data diolah)

Hasil ANP menunjukkan bahwa responden pakar memiliki konvergensi pada 6 dari 10 cluster, sedangkan praktisi hanya pada 4 cluster. Semua responden (pakar, praktisi, dan gabungan) sepakat pada cluster "Masalah" dan "Solusi" (signifikan 10%). Ini menunjukkan

kesepakatan terhadap empat masalah dan solusi terkait wakaf produktif di Kalimantan Timur, meskipun masih ada 4 cluster yang tidak disepakati.

Tabel 2. Hasil ANP prioritas W Rate Agreement Cluster Masalah

CLUSTER	Responden			
	Pakar	Praktisi	Gabungan	Prioritas
MASALAH NAZIR	0.0869	0.0807	0.0822	1
MASALAH WAKIF	0.0312	0.0114	0.0155	4
MASALAH REGULATOR	0.0312	0.0372	0.0425	2
MASALAH PEMERINTAH	0.0172	0.0372	0.0263	3
Inkonsistensi	0.0103**	0.01153**	0.01914**	
Kendall's W	0.4840	0.8920	0.4730	
X ²	7.2600	13.380	14.190	
p-Value	0.0641	0.0038	0.0026	

***signifikan pada 1%; **signifikan pada 5%; *signifikan pada 10%

Sumber: penulis (data diolah)

Hasil ANP menunjukkan masalah nazir (0.0822) paling disepakati, diikuti regulator (0.0425), pemerintah (0.0263), dan wakif (0.0155). Keempatnya memiliki konsistensi tinggi (inkonsistensi <1%) dan kesepakatan signifikan (Kendall's W 1%).

Tabel 3. Hasil ANP prioritas W Rate Agreement seluruh Cluster Solusi

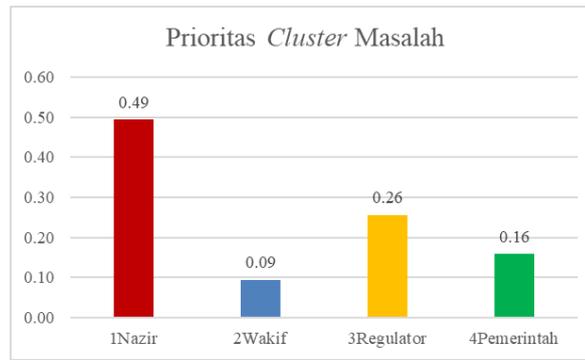
CLUSTER	Responden			
	Pakar	Praktisi	Gabungan	Prioritas
SOLUSI NAZIR	0.0694	0.0741	0.0834	1
SOLUSI WAKIF	0.0424	0.0132	0.0256	3
SOLUSI REGULATOR	0.0424	0.0490	0.0422	2
SOLUSI PEMERINTAH	0.0125	0.0304	0.0155	4
Inkonsistensi	0.01039**	0.01914**	0.01914**	
Tabel dilanjut ke halaman berikutnya				
Kendall's W	0.1520	0.9040	0.3800	
X ²	2.2800	13.560	11.400	
p-Value	0.5164	0.0036	0.0097	

***signifikan pada 1%; **signifikan pada 5%; *signifikan pada 10%

Sumber: penulis (data diolah)

Hasil ANP menunjukkan solusi Nazir (0.0834) paling disepakati, diikuti oleh solusi regulator (0.0422), wakif (0.0256), dan pemerintah (0.0155). Keempat solusi memiliki konsistensi tinggi (inkonsistensi <1%) dan kesepakatan signifikan (Kendall's W 1%).

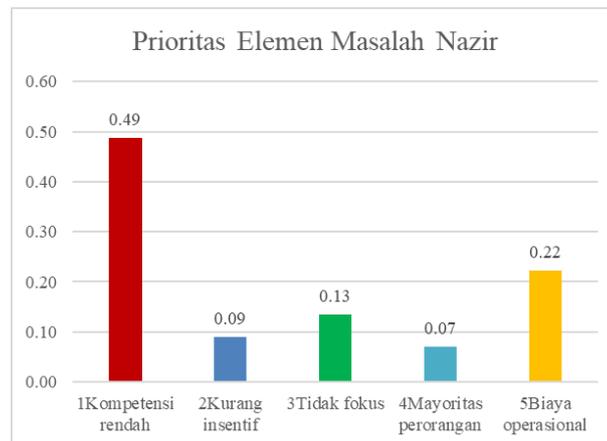
Berbagai pendapat dari masing-masing elemen tercermin dari pilihan gabungan responden pada masing-masing hasil prioritas cluster masalah, cluster solusi, sub cluster masalah dan sub cluster solusi.



Gambar 1. Hasil ANP Prioritas Cluster Masalah

Sumber: berbagai sumber, (data diolah)

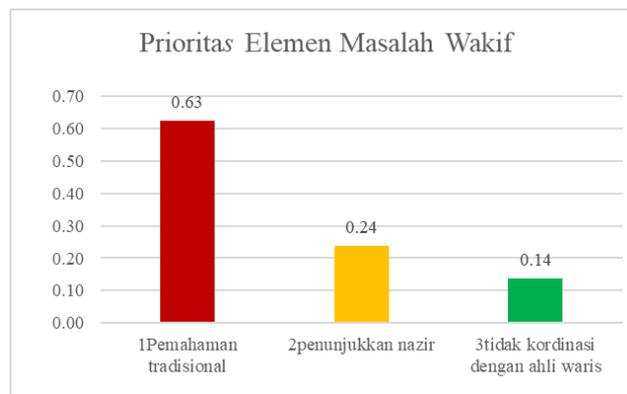
Solusi Nazir (0.0834) paling disepakati, diikuti regulator (0.0422), wakif (0.0256), dan pemerintah (0.0155), dengan konsistensi tinggi (inkonsistensi <1%) dan kesepakatan signifikan (Kendall's W 1%).



Gambar 2. Hasil ANP Prioritas Elemen Masalah Nazir

Sumber: berbagai sumber (Data diolah)

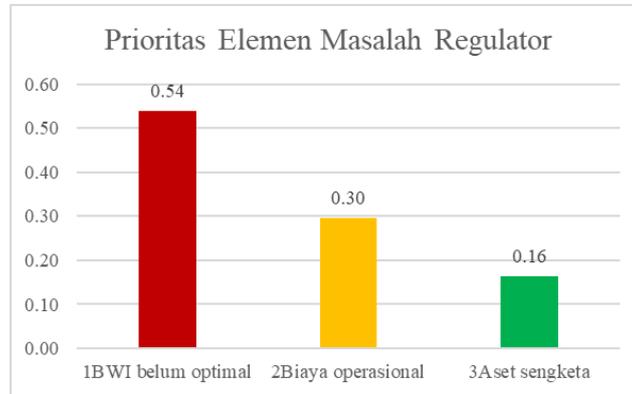
Hasil menunjukkan masalah utama pengelolaan wakaf adalah nazir, dengan prioritas: rendahnya kompetensi (GMk 0.49), minimnya biaya operasional (0.22), tidak fokus (0.13), kurangnya insentif (0.09), dan mayoritas perorangan (0.07). Nilai Kendall's W sebesar 0.4975 menunjukkan kesepakatan responden.



Gambar 3. Hasil ANP Prioritas Elemen Masalah Wakif

Sumber: berbagai sumber (Data diolah)

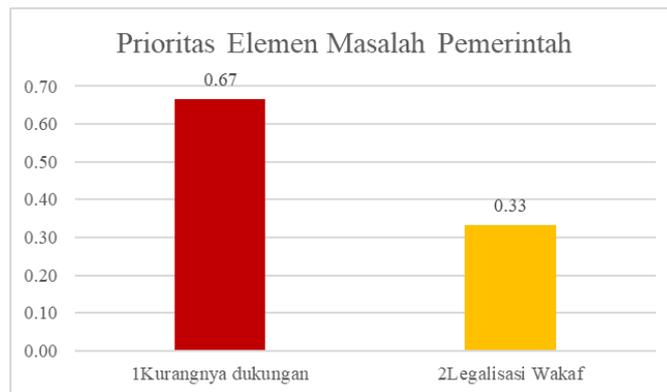
Prioritas masalah pada aspek wakif adalah pemahaman wakif yang masih tradisional (GMk 0.63), penunjukan nazir oleh wakif (0.24), dan kurangnya koordinasi dengan ahli waris (0.14). Nilai Kendall's W sebesar 0.49 menunjukkan kesepakatan antara pakar dan praktisi terkait permasalahan wakif yang mempengaruhi rendahnya wakaf produktif di Kalimantan Timur.



Gambar 4. Hasil ANP Prioritas Elemen Masalah Regulator

Sumber: berbagai sumber (Data diolah)

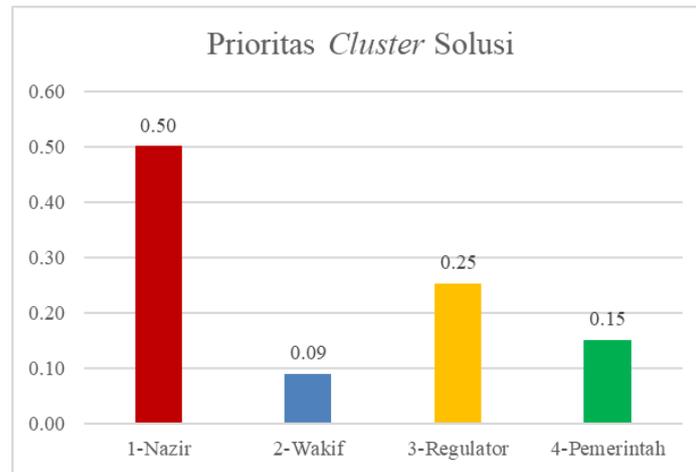
Prioritas masalah pada aspek regulator adalah BWI Kaltim yang belum optimal (GMk 0.54), biaya operasional (0.30), dan sengketa aset wakaf (0.14). Nilai Kendall's W sebesar 0.1225 menunjukkan tingkat kesepakatan yang bervariasi antara pakar dan praktisi terkait masalah regulator yang mempengaruhi rendahnya wakaf produktif di Kalimantan Timur.



Gambar 5. Hasil ANP Prioritas Elemen Masalah Pemerintah

Sumber: berbagai sumber (Data diolah)

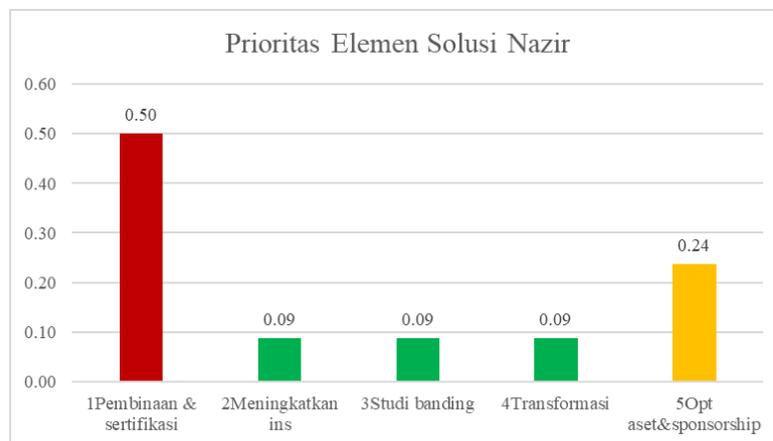
Prioritas masalah pada aspek pemerintah adalah kurangnya dukungan dan peran pemerintah (GMk 0.67) serta legalisasi tanah wakaf (0.33). Nilai Kendall's W sebesar 0.04 menunjukkan tingkat kesepakatan yang bervariasi antara pakar dan praktisi terkait masalah yang menyebabkan wakaf belum berkembang pada aspek pemerintah.



Gambar 6. Hasil ANP Prioritas Cluster Masalah

Sumber: berbagai sumber, (data diolah)

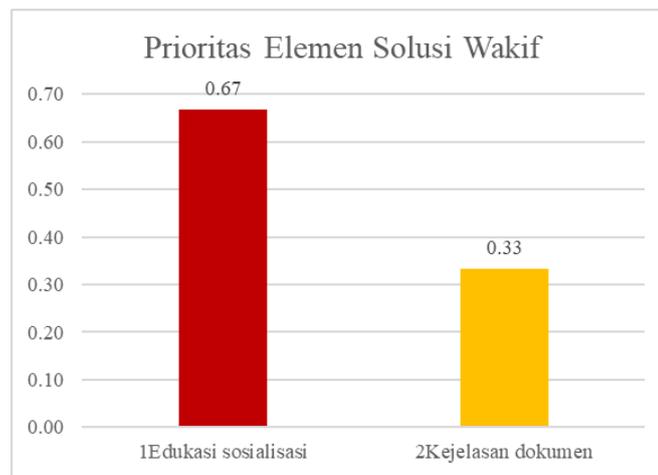
Prioritas solusi untuk permasalahan wakaf produktif di Kalimantan Timur adalah solusi nazir (GMk 0.50), regulator (0.25), pemerintah (0.15), dan wakif (0.09). Nilai Kendall's W sebesar 0.09 menunjukkan tingkat kesepakatan responden yang tinggi.



Gambar 7. Hasil ANP Prioritas Elemen Solusi Nazir

Sumber: berbagai sumber (Data-data diolah)

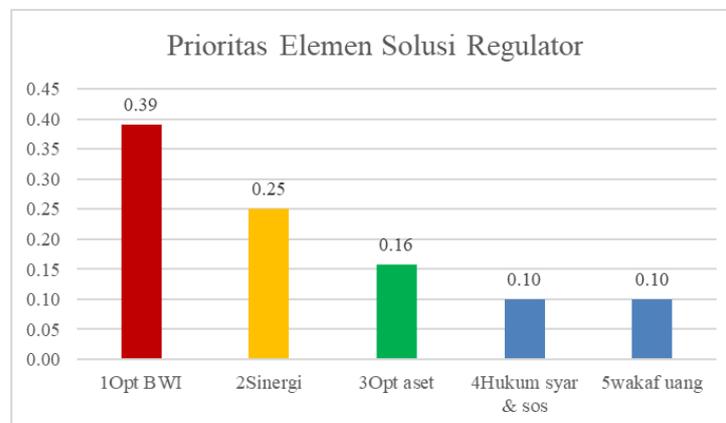
Prioritas solusi pada aspek nazir adalah pembinaan dan pendampingan nazir (GMk 0.50), optimalisasi aset wakaf dan sponsorship (0.24), serta tiga solusi lainnya (insentif, studi banding, dan transformasi nazir lembaga) dengan GMk 0.09. Nilai Kendall's W untuk pakar adalah 0.67 dan praktisi 0.04, menunjukkan kesepakatan dalam masing-masing kelompok responden.



Gambar 8. Hasil ANP Prioritas Elemen Solusi Wakif

Sumber: berbagai sumber (Data diolah)

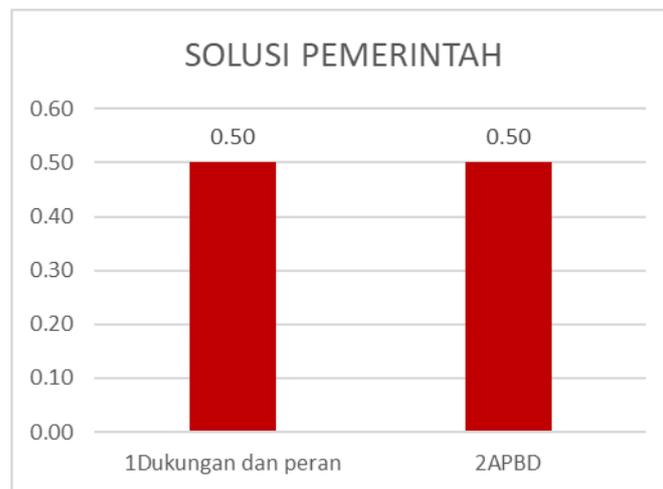
Prioritas solusi pada aspek wakif adalah edukasi dan sosialisasi (GMk 0.67), diikuti kejelasan dokumen (0.33). Nilai Kendall's W sebesar 0.6400 menunjukkan tingkat kesepakatan responden yang cukup bervariasi terhadap solusi permasalahan wakaf produktif pada aspek wakif.



Gambar 9. Hasil ANP Prioritas Elemen Solusi Regulator

Sumber: berbagai sumber (Data diolah)

Prioritas solusi pada aspek regulator adalah optimalisasi peran BWI (GMk 0.39), sinergi dengan lembaga terkait (0.25), optimalisasi aset wakaf (0.16), serta hukum sosial dan Syariah serta menghimpun wakaf uang (0.10). Nilai Kendall's W sebesar 0.4268 menunjukkan tingkat kesepakatan responden yang cukup bervariasi.



Gambar 10. Hasil ANP Prioritas Elemen Solusi Pemerintah

Sumber: berbagai sumber (Data diolah)

Prioritas solusi pada aspek pemerintah adalah dukungan pemerintah dan penggunaan APBD untuk tiap wilayah, dengan GMk sebesar 0.50. Nilai Kendall's W sebesar 0.0400 menunjukkan tingkat kesepakatan responden yang cukup tinggi terhadap solusi permasalahan wakaf produktif pada aspek pemerintah

Hasil pengujian menggunakan analytic network process menunjukkan bahwa masalah nazir memiliki nilai Gmk tertinggi dibandingkan tiga sub-cluster lainnya, menjadikannya prioritas utama dalam rendahnya wakaf produktif di Kalimantan Timur. Menurut responden, nazir merupakan aspek paling penting dalam pengelolaan wakaf, karena produktivitas harta wakaf sangat bergantung pada kemampuan nazir dalam mengelolanya. Dengan posisi dan fungsi strategis, tugas nazir mencakup perlindungan harta wakaf, penjagaan kemaslahatan, dan pengembangan kemanfaatannya. Oleh karena itu, masalah nazir perlu mendapat perhatian lebih besar untuk diatasi.

Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh (Ali et al., 2018), Fitri & Wilantoro, (2018), Meliza & Saputra, (2022), Triyawan, (2023), (N. Huda et al., 2017), (Ismail, 2019).

Rendahnya kompetensi nazir menjadi faktor utama yang menghambat produktivitas wakaf di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh penunjukan nazir yang dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan atau kepercayaan kepada tokoh agama setempat, bukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Meskipun nazir di Kalimantan Timur memiliki kompetensi agama yang baik, mereka masih kurang dalam hal kompetensi bisnis, ditambah minimnya pembinaan dari BWI Kaltim. Beberapa nazir yang sadar akan pentingnya kompetensi bahkan harus mengikuti pelatihan dan sertifikasi secara mandiri dengan biaya yang cukup mahal, karena informasi dan dukungan pelatihan lebih sering berasal dari BWI pusat daripada BWI Kaltim.

Selain itu, wakif di Kalimantan Timur masih memiliki pemahaman tradisional, yang cenderung mewakafkan harta untuk makam, masjid, dan madrasah karena merasa manfaat atau pahalanya lebih langsung dirasakan. Pemahaman ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait wakaf produktif, baik dari sisi peraturan Islam maupun perundang-undangan. Wakif juga sering menunjuk nazir berdasarkan kepercayaan pribadi atau kedekatan tanpa mempertimbangkan kompetensi. Masalah lain yang cukup penting adalah kurangnya koordinasi antara wakif dan ahli waris, yang meskipun tidak selalu memicu sengketa, tetap menjadi kendala dalam pengembangan wakaf produktif.

Di sisi lain, BWI memiliki peran strategis dalam mengembangkan wakaf, termasuk pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan nazir. Namun, peran BWI Kaltim dinilai belum optimal karena terbatasnya pendanaan operasional dan pengaruh kepemimpinan. Pendanaan yang minim menjadi kendala utama dalam menjalankan tugas-tugas penting seperti pelatihan, pembinaan, dan pendampingan nazir. Selain itu, sengketa aset wakaf menjadi tantangan lain, meskipun jumlahnya tidak banyak karena sebagian besar aset wakaf belum produktif. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan kreativitas, kepemimpinan yang kuat, dan kolaborasi, seperti penggalangan wakaf tunai.

Dukungan pemerintah terhadap pengembangan wakaf di Kalimantan Timur juga masih dirasa kurang oleh kelompok praktisi, meskipun beberapa akademisi menyatakan bahwa pemerintah sudah cukup mendukung. Pemerintah telah membuat banyak regulasi, program kolaborasi, dan percepatan legalisasi tanah wakaf, seperti memberikan dana support sebesar Rp2.000.000 per bidang. Namun, implementasinya sering terkendala, terutama di wilayah pedalaman, di mana biaya pengurusan sertifikat seringkali lebih mahal daripada dana yang disediakan. Meski demikian, pemerintah terus berupaya mempercepat sertifikasi tanah wakaf dan mendukung berbagai program pengembangan wakaf produktif.

Solusi yang paling utama dalam rendahnya wakaf produktif di Kalimantan Timur adalah solusi untuk permasalahan nazir, sehingga nazir perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dari solusi yang lain. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitri & Wilantoro, 2018), (Meliza & Saputra, 2022), dan (Ismail, 2019) mengenai strategi optimalisasi wakaf di berbagai wilayah di Indonesia yang menunjukkan faktor internal yang di dalamnya mencakup sumber daya nazir memiliki prioritas solusi utama.

Pembinaan dan pendampingan nazir menjadi solusi utama untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola wakaf secara produktif di Kalimantan Timur. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 53 yang menyatakan bahwa nazir berhak memperoleh pembinaan dari menteri dan BWI. Meskipun tugas dan kewajiban nazir cukup berat, perhatian terhadap kompetensi mereka masih kurang, terutama karena minimnya pendanaan untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan. Dengan adanya pembinaan yang intensif, kreativitas dan kompetensi nazir diharapkan meningkat sehingga pengelolaan harta benda wakaf menjadi lebih optimal.

Pada aspek wakif, edukasi dan sosialisasi menjadi langkah penting untuk mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini memahami wakaf hanya sebatas untuk masjid, makam, dan madrasah. Melalui edukasi yang komprehensif, baik tentang hukum Islam maupun perundang-undangan terkait wakaf, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman lebih luas mengenai wakaf produktif. Selain itu, edukasi ini juga dapat membantu wakif dalam menunjuk nazir yang profesional dan kompeten sehingga pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran strategis sebagai regulator dalam memajukan perwakafan nasional. BWI perlu meningkatkan efektivitas kinerjanya melalui proses rekrutmen yang transparan, pembuatan kebijakan yang sesuai standar, serta perencanaan jangka panjang yang fokus pada tujuan umat. BWI juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun kesadaran tentang pentingnya wakaf, memastikan pengelolaan aset sesuai syariah, dan melindungi hak penerima manfaat. Dengan pembinaan intensif yang dilakukan oleh BWI, kompetensi nazir dapat ditingkatkan sehingga pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif.

Dukungan pemerintah terhadap pengembangan wakaf di Kalimantan Timur sudah terlihat dari regulasi dan lembaga khusus seperti BWI. Namun, implementasi regulasi tersebut di Kalimantan Timur masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain seperti Pulau Jawa, yang telah lebih maju dalam mengembangkan wakaf produktif. Meskipun regulasi dibuat sebagai pedoman ideal, pelaksanaannya seringkali terhambat, terutama di wilayah-wilayah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara

pemerintah, BWI, dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan regulasi berjalan efektif dan mendukung pengembangan wakaf secara produktif

4. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa prioritas utama dalam permasalahan rendahnya wakaf produktif di Kalimantan Timur adalah kompetensi nazir yang masih rendah, diikuti oleh kurang optimalnya peran BWI, minimnya dukungan pemerintah, dan pemahaman masyarakat yang masih tradisional tentang wakaf. Untuk solusi, prioritas utama adalah pembinaan dan pendampingan nazir, optimalisasi peran BWI, peningkatan dukungan pemerintah, serta edukasi dan sosialisasi wakaf produktif untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar prioritas masalah dan solusi yang telah diidentifikasi dijadikan acuan untuk meningkatkan pengelolaan wakaf produktif. Regulator seperti BWI perlu dukungan pendanaan dari APBN atau APBD agar lebih optimal, sementara nazir membutuhkan pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi untuk meningkatkan manajerial dan kreativitas nya. Kerja sama antar lembaga juga diperlukan melalui forum khusus yang melibatkan pemerintah, BWI, nazir, ormas Islam, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang wakaf produktif harus diperluas kepada semua elemen, termasuk masyarakat, melalui berbagai media dan kegiatan edukatif.

5. REFERENSI

- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-aspek prioritas manajemen wakaf di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1–28.
- Anohib, A. (2017). Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). *Fenomena wakaf di Indonesia: Tantangan menuju wakaf produktif*. Badan Wakaf Indonesia.
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Al-Muzara'ah*, 6(1), 41–59.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2016). Manajemen pengelolaan wakaf di Indonesia timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 20(1), 1–17.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2017). Problems, solutions and strategies priority for waqf in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 38(1), 29.
- Meliza, D. D., & Saputra, A. (2022). Analisis Prioritas Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Dengan Metode Analytical Network Process (ANP) Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 4(1), 44–55.
- Putra, T. W., & Sikki, K. L. (2025). A Comparative Expert-Based Analysis for Prioritizing Waqf Asset Optimization Strategies in Indonesia: An Analytic Network Process (ANP) Approach. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 74–90.
- Safitri, A. W. (2021). *Model kelembagaan nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.